



PEMERINTAH
KABUPATEN
KEBUMEN

RENCANA STRATEGIS

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TAHUN 2025 - 2029



(0287) 384088



kesbangpolkkebumen@gmail.com



Jl. Arungbinang No. 15 Kebumen 54311

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas perkenan dan hidayah-Nya maka dokumen "Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen 2025 - 2029" ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide-ide, masukan dan analisa yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan masyarakat dibidang kesatuan bangsa dan politik. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen secara terpadu dan berkelanjutan.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan bidang kesatuan bangsa dan politik yang lebih baik di Kabupaten Kebumen. Akhir kata, semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Kebumen, dalam mewujudkan cita-cita bersama menuju kehidupan yang lebih harmonis, aman, dan sejahtera.

Kebumen, 19 September 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Kebumen



IDIA MOKO, S.H.,M.H.
Pembina Utama Muda
196811281996031006

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGGSA DAN POLITIK	8
2.1. GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESBANGPOL..	8
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.1.2 Sumber Daya Badan Kesbangpol	17
2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol	23
2.1.4 Kinerja Keuangan Badan Kesbangpol	34
2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Badan Kesbangpol...	37
2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESBANGPOL	38
2.2.1 Permasalahan Layanan Badan Kesbangpol.....	38
2.2.2 Isu Strategis Daerah	48
 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	51
3.1. Tujuan dan Sasaran RENSTRA Badan Kesbangpol.....	51
3.2. Strategi Badan Kesbangpol	54
3.3. Arah Kebijakan Badan Kesbangpol	55
 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	57
4.1. Uraian Program dan Kegiatan	57

4.2. Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	81
4.3. Uraian SubKegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	91
4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	97
4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	98
BAB V PENUTUP	99

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang baik. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang telah memberikan kewenangan utuh dan bulat kepada daerah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Semangat reformasi di bidang politik, pemerintahan dan pembangunan juga mewarnai upaya pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJM Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen berkewajiban menyusun Renstra (Rencana Strategis). Rencana strategis dimaksud disusun sebagai langkah awal untuk melaksanakan RPJMD Kabupaten Kebumen, yang dalam penyusunannya dilakukan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*). Analisa lingkungan internal digunakan untuk menyusun peta masalah yang selama ini berkembang dan belum dapat terpecahkan, sedangkan analisa lingkungan eksternal adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di luar organisasi.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 disusun dengan maksud untuk menyajikan sebuah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen. Renstra disusun sebagai bentuk implementasi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam rangka mengembangkan otonomi daerah, hal ini ditunjang oleh Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik serta sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen mengemban amanah sebagai pelaksana urusan wajib bukan pelayanan dasar Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk melaksanakan fungsi dan peran sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen menyusun beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang diharapkan dapat mendukung

pencapaian target yang ditetapkan dengan memaksimalkan anggaran dan sumber daya manusia yang tersedia.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen

Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Kebumen khususnya bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah memuat : tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah, Sumber daya Perangkat Daerah, Kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan Kelompok Sasaran.
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah memuat : permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan isu strategis.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.

BAB III berisi Tujuan Renstra Perangkat Daerah, Sasaran Renstra Perangkat Daerah, Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

BAB IV memuat uraian program, uraian kegiatan, uraian sub kegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V Penutup

BAB V memuat diantaranya : kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2. 1 Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

A. Tugas Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Kabupaten Kebumen, tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

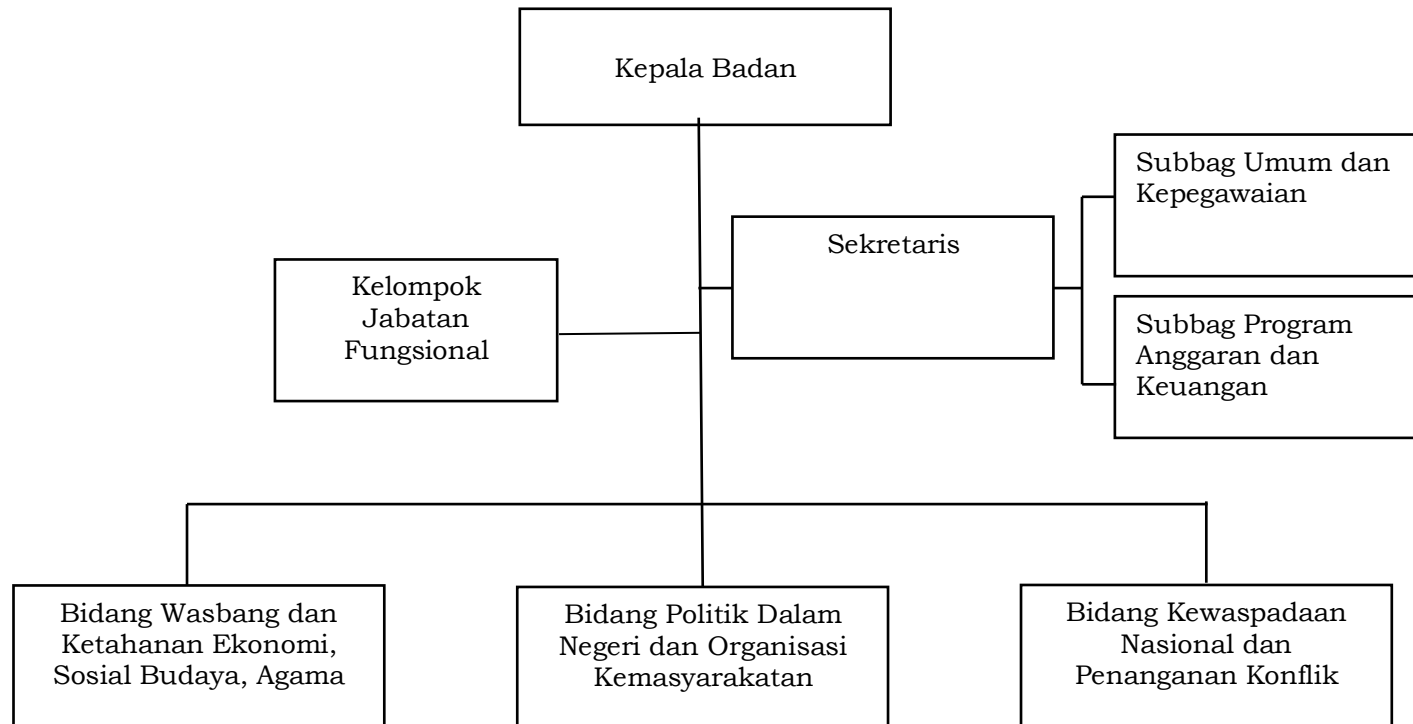
4. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
6. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

B. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI BAKESBANGPOL KABUPATEN KEBUMEN



Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, uraian tugas jabatan struktural Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan.

Mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.

2. Sekretaris.

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, protokol, penanganan aduan, arsip, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan Badan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Badan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan yaitu :

a. Subbagian Program Anggaran dan Keuangan

Subbagian Program Anggaran dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan

b. Subbag Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik Daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial,

dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Daerah;

- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Daerah;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama yaitu :

- 1) Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.
- 2) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya,

fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik, serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik, serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Daerah;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik, serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik, serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Daerah;

- kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik, serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Daerah;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik, serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, yaitu :

- 1) Subbidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik.
- 2) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing.

5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah, pengamanan tertutup upacara, keramaian umum, kunjungan *Very Important Person* dan *Very Very Important Person* serta penanganan konflik.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah, pengamanan tertutup upacara, keramaian umum, kunjungan *Very Important Person* dan *Very Very Important Person* serta penanganan konflik di wilayah Daerah;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah, pengamanan tertutup upacara, keramaian umum, kunjungan *Very Important Person* dan *Very Very Important Person* serta penanganan konflik di wilayah Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah, pengamanan tertutup upacara, keramaian umum, kunjungan *Very Important Person* dan *Very Very Important Person* serta penanganan konflik di wilayah Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah, pengamanan tertutup upacara, keramaian umum, kunjungan *Very*

Important Person dan *Very Very Important Person* serta penanganan konflik di wilayah Daerah;

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah, pengamanan tertutup upacara, keramaian umum, kunjungan *Very Important Person* dan *Very Very Important Person* serta penanganan konflik di wilayah Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, yaitu :

- a. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah, serta pengamanan tertutup upacara, keramaian umum, kunjungan *Very Important Person* dan *Very Very Important Person*.
- b. Subbidang Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang penanganan konflik.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

A. Sumber Daya Aparatur.

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

Sumberdaya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen di klasifikasikan ke dalam tingkat pendidikan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Jenis Kelamin	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Laki-laki	16	16	17	18	20
2	Perempuan	5	5	5	4	8
	Jumlah	21	21	22	22	28

Tabel 2.2
Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Kepala	1	-	1
2	Sekretariat	7	4	11
3	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama.	4	1	5
4	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.	3	2	5
5	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.	6	0	6
	Jumlah	21	7	28
	Persentase	75	25	100

Dari jumlah pegawai sebanyak 23 orang ini kemudian di tentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala	1						1
2	Sekretariat	2	3	5	-	1	-	11
3	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	-	4	-	1	-	-	5

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
	Ekonomi, Sosial Budaya, Agama							
4	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.	-	4	-	1	-	-	5
5	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	1	4	-	1	-	-	6
Jumlah		4	15	5	3	1	-	28
Persentase		14,29	53,57	17,86	10,71	3,57	0	100

Tabel 2.4
Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasar Golongan Tahun 2025

No	Uraian	Golongan				Jumlah
		Gol VII/IX	Gol I/II	Gol III	Gol IV	
1	Kepala				1	1
2	Sekretariat	1	3	6	1	11
3	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama	-	-	5	-	5
4	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.	-	-	5	-	5
5	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik		1	4	1	6
Jumlah		1	4	20	3	28
Persentase		3,57	14,29	71,43	10,71	100

a. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen. Sarana dan prasarana yang tersedia di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Aset Tanah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M ²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah		Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan	
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal					Nomor
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	439 m ²	1982	Jalan Arungbinang		1982	00187		Pembelian	269.675.000	

Tabel 2.3.
Gedung dan Bangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
1	Bangunan gedung kantor permanen	Baik	441 m ²	Jalan Arungbinang	441 m ²		Pembelian	1.474.796.995
2	Bangunan gedung instalasi permanen	Baik		Jalan Rumah Sakit	184 m ²		Pembelian	1.679.936.750

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Jenis Barang	Keadaan Tahun 2025						Kebutuhan
		Total	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Penambahan	Pemeliharaan	
1	Transportable Generating Set	1			1			1
2	Station Wagon(Mobil)	4	2		2			6
3	Sepeda Motor	14	13		1			14
4	Lemari Penyimpan	7	7					7
5	Lemari Kayu	8	8					8
6	Rak Besi	7	7					7
7	Rak Kayu	1	1					2
8	Filing Cabinet Besi	16	16					16
9	Lemari Sorok	2	2					2

No	Jenis Barang	Keadaan Tahun 2025						Kebutuhan
		Total	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Penambahan	Pemeliharaan	
10	Lemari Kaca	3	3					3
11	White Board	2	2					2
12	LCD Projector/Infocus	2	2					4
13	Papan Pengumuman	2	2					2
14	Alat Kantor Lainnya Lain-Lain	1	1					1
15	Meja Kerja Kayu	13	13					13
16	Bangku Panjang Kayu	5	5					5
17	Meja Rapat	14	14					14
18	Meja Telepon	1	1					1
19	Meja Resepsionis	1	1					1
20	Kursi Rapat	62	62					70
21	Kursi Tamu	3	3					3
22	Kursi Biasa	1	1					2
23	Meja Komputer	1	1					2
24	Sofa	1	1					2
25	Lemari Es	1	1					1
26	A.C. Split	10	10					12
27	Kipas Angin	4	4					6
28	Televisi	1			1			2
29	Sound System	1	1					2
30	Megaphone	1	1					1
31	Unit Power Supply	1	1					1
32	Camera film	1	1					2
33	Tustel	1	1					1
34	Dispenser	1	1					1
35	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1					1
36	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6	6					6
37	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	7	7					8
38	Meja Tamu Biasa	2	2					3
39	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1					1

No	Jenis Barang	Keadaan Tahun 2025						Kebutuhan
		Total	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Penambahan	Pemeliharaan	
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	6					6
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	7	7					8
42	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	1					2
43	Buffet Kayu	1	1					2
44	Audio Monitor Passive	1	1					2
45	Microphone/Wireless MIC	1	1					3
46	Power Amplifier	1	1					1
47	Peralatan Studio Audio Lain-lain	4	4					4
48	Layar Film/Projector	1	1					2
49	Head Set	2	2					4
50	Handy Talky (HT)	3	3					3
51	Facsimile	1	1					1
52	Tripod	2	2					2
53	Exhaust Fan	1	1					2
54	P.C Unit	7	7					8
55	Lap Top	13	13					28
56	Note Book	6			6			6
57	Peralatan Mini Komputer Lain-Lain	1	1					1
58	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8	7	1				10
59	A.C PORTABLE	1	1					2

2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Kebumen memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan kesatuan bangsa di tingkat daerah. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola bidang politik, ideologi, dan sosial, Bakesbangpol memiliki berbagai layanan yang bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat, serta mencegah munculnya radikalisasi dan konflik sosial.

Secara umum kinerja pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Kebumen telah berjalan dengan baik dan terus berkembang sesuai dengan dinamika yang ada. Kedepan, Bakesbangpol diharapkan dapat semakin meningkatkan efektivitas layanannya dalam merespons berbagai isu yang berkaitan dengan kebangsaan dan politik, guna menjaga stabilitas dan keamanan daerah.

Tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026

No	Indikator Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Persentase Capaian						Ket
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
								n-2	n-1	n	n+1			n-2	n-1	n	n+1			n-2	n-1	n	n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Indikator Tujuan																-						-	
a.	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal, dan Sumber Daya Ekonomi	-	-	-	%	57,14	60,71	64,29	71,43	75	78,57	100	100	100	100	100	-	175	164,72	155,55	140	133,33	-	
	Indikator Sasaran																							
a.	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal, dan Sumber Daya Ekonomi	-	-	-	%	57,14	60,71	64,29	71,43	75	78,57	100	100	100	100	100	-	175	164,72	155,55	140	133,33	-	

Tabel 2.6
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020-2025

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-						Realisasi Capaian pada Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah per 100.000 penduduk			150	24,5	41,64	55,93	87,79	133,79	150	242,14	317,53	380,47	468,37	-	100	988,35	762,56	680,26	533,51	-
I.1	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan			150	23	23	23	23	23	150	23	23	23	23	-	100	100	100	100	100	-
1	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen			22	23	23	23	23	23	22	23	23	23	23	-	100	100	100	100	100	-
II	Capaian Partisipasi Masyarakat/Penduduk dalam Proses Pemilihan Umum	%			67,59	67,59	67,59	69,38	69,38	69,38	71,94	71,94	71,94	75,85	75,85	-	106,44	106,44	106,44	109,33	109,33	-
II.1	Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kegiatan			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	100	100	100	100	100	-

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-						Realisasi Capaian pada Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	orang			100	2.970	2.250	375	100	100	100	2.970	2.250	375	100	-	100	100	100	100	100	-
III	Cakupan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	-
III.1	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kegiatan			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	100	100	100	100	100	-
1	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	orang			125	150	630	150	150	150	125	150	630	150	150	-	100	100	100	100	100	-

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-						Realisasi Capaian pada Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	orang			33	36	36	36	36	36	33	36	36	36	36	-	100	100	100	100	36	-
IV	Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Jumlah per 100.000 penduduk			900	36,71	54,64	75	99,14	129,15	900	268,06	492,43	536,05	635,20	-	100	730,21	901,23	714,74	640,71	-
IV.1	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	kegiatan			3	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	-	100	100	100	100	100	-
1	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budayadan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama danPenghayat Kepercayaan di Daerah	orang			50	3.620	3.030	200	200	200	50	3.620	3.030	200	200	-	100	100	100	100	100	-

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-						Realisasi Capaian pada Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan PenghayatKepercayaan di Daerah	orang			400	400	400	175	175	175	400	650	400	175	175	-	100	163	100	100	100	-
V	Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	Persen			100	60,71	64,29	71,43	75	78,57	100	100	100	100	75	-	100	164,7 2	155,5 5	140	133,3 3	-
V.1	Jumlah Dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Dokumen			1	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	-	100	100	100	100	100	-
1	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas KelembagaanBidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen			-	-	4	4	4	4	-	-	4	4	4	-	-	-	100	100	100	-

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-						Realisasi Capaian pada Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga KerjaAsing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan BidangKewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen			-	-	5	5	5	5	-	-	5	5	5	-	-	-	100	100	100	-
3	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	orang			400	130	130	130	130	130	400	340	130	130	130	-	-	261	100	100	100	-
4	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, PemantauanOrang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, FasilitasiKelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	orang			-	130	130	130	130	130	-	130	130	130	130	-	-	100	100	100	100	-

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-						Realisasi Capaian pada Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan			-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	-	100	100	100	100	-
6	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen			-	-	4	4	4	4	-	-	4	4	4	-	-	-	100	100	100	-
VI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	-
VI.1	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen			5	7	7	7	7	7	5	7	7	7	7	-	100	100	100	100	100	-
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-	100	100	100	100	5	-
2	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen			-	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-	-	100	100	100	2	-
VI.2	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	100	100	100	100	100	-

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-						Realisasi Capaian pada Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan			15	23	23	23	23	23	15	23	23	23	28	-	100	100	100	100	121,74	-
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen			1	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	-	100	100	100	100	100	-
VI.3	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	orang			-	23	23	23	23	23	-	22	23	-	-	-	-	92	100	0	0	-
1	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	orang			-	23	23	23	23	23	-	22	23	-	-	-	-	92	100	0	0	-
VI.4	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-
1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket			1	1	1	1	4	4	1	1	1	1	4	-	100	100	100	100	100	-
2	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket			1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	12	-	100	100	100	100	100	-
3	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket			1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	12	-	100	100	100	100	100	-
4	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen			1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	-	100	100	100	100	100	-

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-						Realisasi Capaian pada Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket			1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	12	-	100	100	100	100	100	-
6	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan			1	12	12	12	12	12	1	12	12	12	12	-	100	100	100	100	100	-
7	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen			-	12	12	12	12	12	-	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-
VI.5	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit			-	1	37	2	7	7	-	1	37	2	7	-	-	100	100	100	100	-
1	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	1	37	2	7	7	-	-	37	2	7	-	-	100	100	100	100	-
VI.6	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	100	100	100	100	100	-
1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan			1	12	12	12	12	12	1	12	12	12	12	-	100	100	100	100	100	-
2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan			1	12	12	12	12	12	1	12	12	12	12	-	100	100	100	100	100	-

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-						Realisasi Capaian pada Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan			1	12	12	12	12	12	1	12	12	12	12	-	100	100	100	100	100	-
VI.7	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit			3	15	54	54	54	54	3	12	54	43	35	-	100	80	100	80	100	-
1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit			1	7	7	7	7	7	1	7	7	7	7	-	100	100	100	100	100	-
2	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit			-	-	25	12	12	25	-	-	25	12	12	-	-	-	100	100	100	-
3	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit			1	7	21	18	15	21	1	7	21	18	15	-	100	100	100	100	100	-
4	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	100	100	100	100	100	-

2.1.4. Kinerja Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Anggaran dan realisasi pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen merupakan aspek krusial dalam mendukung program-program strategis di bidang kesatuan, kebangsaan, dan stabilitas politik daerah. Setiap tahun, anggaran dialokasikan untuk berbagai kegiatan, seperti peningkatan kesadaran bela negara, penguatan wawasan kebangsaan, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, pendidikan politik, serta peningkatan kewaspadaan dini daerah. Penggunaan anggaran ini bertujuan untuk menciptakan kondisi sosial-politik yang kondusif, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik, serta menjaga stabilitas dan ketahanan nasional di tingkat daerah. Dalam penyusunannya, anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen.

Realisasi pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen setiap tahunnya dievaluasi secara berkala guna memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaannya. Laporan realisasi anggaran mencerminkan sejauh mana program dan kegiatan yang direncanakan dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tantangan dalam realisasi pendanaan dapat mencakup berbagai faktor, seperti keterbatasan anggaran, perubahan kebijakan, serta dinamika sosial dan politik yang mempengaruhi pelaksanaan program. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan anggaran menjadi hal yang sangat penting agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mendukung stabilitas politik di Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

No.	Program/ Kegiatan	2021			2022			2023			2024			2025			Rata-rata Pertumbuhan	
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian	Anggaran Perubahan	Realisasi
I	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	483.247	338.310	70,00	333.247	319.250	95,80	415.000	410.838	99,00	568.417	568.319	99,98	531.853	523.303	98,39	6%	0,53
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	483.247	338.310	70,00	333.247	319.250	95,80	415.000	410,838	99,00	568.417	568.319	99,98	531.853	523.303	98,39	6%	0,53
II	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.170.989	2.167.986	99,86	3.562.889	3.540.295	99,37	25.692.385	25.562.296	99,49	39.263.803	39.072.218	99,51	4.236.436	4.149.110	97,94	162%	6,49
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2.170.989	2.167.986	99,86	3.562.889	3.540.295	99,37	25.692.385	25.562.296	99,49	39.263.803	39.072.218	99,51	4.236.436	4.149.110	97,94	162%	6,49
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	70.739	67.902	95,99	37.764	37.451	99,18	237.341	236.985	99,84	76.108	75.885	99,71	49.974	48.781	97,61	95%	3,84
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	70.739	67.902	95,99	37.764	37.451	99,18	237.341	236.985	99,84	76.108	75.885	99,71	49.974	48.781	97,61	95%	3,84
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	264.041	241.114	91,32	1.645.941	1.615.014	98,12	1.722.842	1.713.797	99,48	159.908	152.823	95,57	498.383	637.534	98,40	162%	8,02
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	264.041	241.114	91,32	1.645.941	1.615.014	98,12	1.722.842	1.713.797	99,48	159.908	152.823	95,57	498.383	637.534	98,40	162%	8,02

No.	Program/ Kegiatan	2021			2022			2023			2024			2025			Rata-rata Pertumbuhan	
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian	Anggaran Perubahan	Realisasi
V	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	229.679	229.626	99,98	212.099	207.421	97,79	1.321.847	1.300.335	98,37	2.706.422	1.553.809	57,41	1.406.701	1.361.137	96,76	143%	5,24
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	229.679	229.626	99,98	212.099	207.421	97,79	1.321.847	1.300.335	98,37	2.706.422	1.553.809	57,41	1.406.701	1.361.137	96,76	143%	5,24
VI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.722.947	2.573.888	94,53	3.390.444	3.193.000	94,18	3.591.242	3.459.101	96,32	3.500.835	3.338.367	95,36	4.125.220	3.592.191	87,08	11%	0,37
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.771	11.474	83,32	15.701	15.007	95,59	15.845	15.599	98,45	6.972	6.971	99,99	18.177	17.325	95,31	26%	1,28
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.468.613	2.326.637	94,25	3.038.318	2.848.654	93,75	3.068.415	2.940.434	95,83	3.177.391	3.021.669	95,10	3.777.767	3.264.050	86,40	12%	0,36
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	30.000	29.453	98,18	25.900	25.561	98,69	-	-	-	-	0	0	-3%	0,13
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	92.814	92.354	99,50	94.609	90.932	96,11	113.939	113.511	99,62	90.713	90.112	99,34	58.517	57.174	97,70	-8%	983,28
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	17.794	17.460	98,12	160.835	160.311	99,67	25.300	25.175	99,51	14.965	12.923	86,35	170%	6,85
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.712	60.688	98,34	84.656	83.785	98,97	96.912	94.617	97,63	116.760	110.958	95,03	119.093	104.367	87,86	19%	0,62
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.037	82.734	96,16	109.366	107.807	98,57	109.396	109.065	99,70	83.699	83.480	99,74	136.699	136.081	99,55	17%	0,71

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kelompok sasaran layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan pihak-pihak yang menjadi fokus dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Penetapan kelompok sasaran ini disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Kabupaten Kebumen. Adapun kelompok sasaran layanan Badan Kesbangpol meliputi:

1. **Lembaga Pendidikan** (SMP, SMA, Perguruan Tinggi), sebagai kelompok sasaran penting dalam pembinaan karakter bangsa melalui peningkatan wawasan kebangsaan, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, serta upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini.
2. **Partai politik**, dalam rangka pembinaan dan fasilitasi guna meningkatkan kualitas pendidikan politik masyarakat serta mendukung pelaksanaan demokrasi yang sehat dan berintegritas.
3. **Organisasi kemasyarakatan (Ormas)**, sebagai mitra strategis dalam menjaga kondusivitas daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
4. **Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)**, sebagai mitra pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat, penguatan demokrasi, serta pengawasan terhadap kebijakan publik.
5. **Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)**, merupakan wadah strategis dalam menjaga dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama.
6. **Dinas/Instansi Vertikal**, Dinas dan instansi vertikal merupakan mitra koordinatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kesbangpol.
7. **Masyarakat umum**, memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa melalui berbagai upaya yang dilakukan diantaranya : pendidikan politik, penguatan ideologi Pancasila serta pencegahan konflik sosial, sehingga menjadi pelaku aktif dalam menciptakan kehidupan yang aman, damai dan demokratis.

2. 2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.2.1 Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

A. Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

Isu strategis adalah permasalahan utama yang memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian tujuan organisasi dan perlu mendapat perhatian khusus karena sifatnya yang mendesak, berdampak luas, serta berpotensi memengaruhi arah kebijakan di masa depan

Isu-isu strategis mencakup berbagai urgensi terhadap kondisi dan perihal yang sangat penting dalam pembangunan daerah, baik pada masa kini maupun masa mendatang. Isu strategis melibatkan identifikasi isu global, isu nasional, isu regional dan isu daerah yang saling terkait dan terintegrasi. Memahami pentingnya isu-isu strategis, kita dapat meminimalkan risiko kegagalan dan mengambil peluang untuk mendorong kemajuan yang berkelanjutan dalam pembangunan daerah.

Dari rumusan permasalahan, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen. Dalam perumusan permasalahan isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen diantaranya dengan melakukan identifikasi terhadap permasalahan berdasarkan kondisi riil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.

Sebagaimana dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen. Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum, maka dirumuskan permasalahan Pembangunan Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen yaitu : “Meningkatnya potensi konflik sosial”. Permasalahan dan akar permasalahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.8
Rumusan Permasalahan

No	Pokok Masalah	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Meningkatnya potensi konflik sosial	Peningkatan potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas politik dan keamanan daerah.	Kurangnya koordinasi antarlembaga, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya stabilitas, serta lemahnya pengawasan dan mitigasi dini terhadap isu-isu sosial, politik, dan ekonomi yang berpotensi menimbulkan konflik atau gangguan keamanan.
2		Perubahan perilaku sosial masyarakat sebagai dampak teknologi dan informasi.	Kurangnya literasi digital dan kemampuan kritis dalam menyaring informasi, serta dominasi teknologi yang mengubah pola interaksi sosial menjadi lebih individualistik dan rentan terhadap pengaruh negatif seperti hoaks dan budaya konsumtif.
3		Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.	Rendahnya edukasi tentang bahaya narkoba, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, tekanan sosial dan ekonomi yang memicu kerentanan individu, serta keberadaan jaringan distribusi yang terorganisir dan sulit diberantas.
4		Melemahnya pemahaman dan implementasi Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.	Kurangnya pendidikan yang sistematis dan relevan tentang nilai-nilai Pancasila, adanya pengaruh globalisasi dan informasi yang tidak terkendali yang menggeser kesadaran akan identitas dan persatuan nasional.
5		Tingkat partisipasi politik masyarakat masih rendah.	Minimnya edukasi politik yang inklusif, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap

No	Pokok Masalah	Permasalahan	Akar Permasalahan
			lembaga politik, serta kurangnya akses dan motivasi untuk terlibat dalam proses demokrasi akibat ketimpangan informasi dan apatisme sosial.

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka permasalahan pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama.
 - a. Ancaman terhadap ideologi Pancasila akibat pengaruh globalisasi, liberalisme, dan individualisme yang dapat mengikis nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong.
 - b. Meningkatnya paham radikal dan intoleransi yang bertentangan dengan Pancasila.
 - c. Masih maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
 - d. Masuknya budaya asing akibat arus globalisasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada perilaku dan budaya di masyarakat.
 - e. Masalah kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin yang dapat memicu ketidakstabilan yang dapat memicu konflik sosial.
2. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
 - a. Polarisasi politik pasca pemilu atau pilkada dapat memicu perpecahan di masyarakat.
 - b. Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi;
 - c. Capaian tingkat partisipasi politik masyarakat masih dibawah target nasional.
 - d. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan propaganda politik melalui media sosial yang memperuncing perbedaan pandangan dalam berpolitik.

- e. Kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang tidak memenuhi aturan atau menyimpang dari tujuan awal.
3. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
- a. Masih munculnya konflik dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah.
 - b. Ketimpangan ekonomi dan sosial yang dapat memicu ketidakstabilan dan konflik horizontal.
 - c. Adanya potensi konflik yang dipicu oleh perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang dapat memecah belah persatuan nasional
 - d. Meningkatnya serangan siber (*cybercrime*) seperti peretasan, pencurian data, dan disinformasi yang mengancam keamanan nasional.

B. TELAAH

1. Telaah Kebijakan Nasional

Dalam menyusun tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen, sudah seharusnya memiliki keterkaitan dengan sasaran jangka menengah Kementerian Dalam Negeri yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Adapun penugasan kinerja Kementerian Dalam Negeri dengan indikator sebagai berikut :

- 1. Menjaga kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional.
- 2. Menjadi Bangsa Mandiri dalam memenuhi kebutuhan Air.
- 3. Mewujudkan Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif.
- 4. Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- 5. Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan
- 6. Menerapkan keadilan hukum dan sistem anti korupsi.
- 7. Memperbaiki kinerja birokrasi.

8. Mencapai peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi.

Berkaitan dengan 8 indikator tersebut di atas, peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen memiliki korelasi dalam mendukung tujuan penugasan Kementerian Dalam Negeri yaitu Menjaga kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional di tingkat daerah.

2. Telaah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Merujuk pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 050.11/42 Tentang Pedoman Renstra dan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra disebutkan bahwa Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yang tertuang dalam Rancangan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 diarahkan pada tujuan "Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari" yang ditunjukkan dengan kemiskinan yang semakin menurun, pendapatan per kapita yang semakin meningkat, serta berkurangnya ketimpangan pendapatan antar masyarakat, dengan sasaran meliputi:

1. Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing, dan berkelanjutan;
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif;
3. Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- dan 4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Berdasarkan pada sasaran diatas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian sasaran ke empat yaitu terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang dinamis, dimana tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah diarahkan untuk meningkatkan kesatuan bangsa dan politik dengan indikator Indeks Ketahanan Ipoleksosbud Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam kerangka tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Kebumen telah sejalan dengan tugas dan fungsi dari Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah.

3. Telaah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen merupakan instrumen penting dalam mengatur pemanfaatan ruang secara optimal, berkelanjutan, dan berkeadilan. Dalam

implementasinya, RTRW tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik pembangunan, tetapi juga membawa implikasi terhadap dinamika sosial, politik, dan keamanan daerah. Perubahan fungsi lahan, pertumbuhan kawasan industri, urbanisasi, hingga pengembangan kawasan strategis dapat memicu munculnya potensi konflik sosial, pergeseran demografi, serta kerentanan dalam kerukunan antar kelompok masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menjadi sangat strategis dalam menjaga stabilitas sosial-politik serta ketahanan nasional di tingkat daerah.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dalam pembinaan wawasan kebangsaan, penguatan kerukunan, pencegahan konflik, dan deteksi dini gangguan keamanan, Bakesbangpol berperan penting dalam mengantisipasi dampak sosial-politik dari pelaksanaan RTRW. Melalui koordinasi lintas sektor, pembinaan organisasi kemasyarakatan, penguatan forum-forum kewaspadaan dini, serta pembentukan jejaring deteksi dini, Bakesbangpol dapat membantu menciptakan kondisi yang kondusif bagi keberhasilan pembangunan ruang wilayah Kabupaten Kebumen sesuai dengan tujuan RTRW. Sinergi antara perencanaan tata ruang dan pengelolaan dinamika sosial-politik menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang aman, harmonis, dan berkelanjutan.

4. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan KLHS isu yang terkait dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen 2025-2029 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)-RPJMD Kabupaten Kebumen memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. KLHS-RPJMD berfungsi sebagai instrumen yang memastikan bahwa setiap kebijakan, rencana, dan program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD telah mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. KLHS-RPJMD mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dari berbagai kegiatan pembangunan, serta memberikan rekomendasi mitigasi dan pengelolaan risiko lingkungan. Dengan demikian, KLHS-RPJMD memastikan bahwa RPJMD Kabupaten Kebumen 2025-2029 tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk generasi mendatang

Tabel 2.9
Tema Isu KLHS Kabupaten Kebumen

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Kebumen untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
Kondusifitas Wilayah	Meningkatkan peran Pemerintah bersama masyarakat guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta penguatan mitigasi ekstrimisme, terorisme dan radikalisme untuk mewujudkan kondusifitas wilayah.
Toleransi	Meningkatkan edukasi tentang wawasan kebangsaan, keberagaman, toleransi, bahaya narkoba dan pemberdayaan ormas.
Demokrasi	Meningkatkan demokratisasi dengan penguatan partisipasi pemilih, partisipasi politik dan kesadaran hak kewarganegaraan serta membangun kemitraan strategis dalam rangka penguatan pilar demokrasi dan partisipasi politik perempuan di Jawa Tengah.

5. Telaah RPJMD Kabupaten Kebumen

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kebumen serta budaya yang hidup dalam masyarakat; maka visi dan misi pembangunan selaras dengan visi dan misi bupati terpilih pada pemilihan umum kepala daerah. Visi merupakan gambaran umum tujuan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada akhir periode. Sedangkan misi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah.

Visi Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yaitu **Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman – Maju – Sejahtera – Berbudaya.**

Kebumen Berdaya memiliki makna bahwa masyarakat Kebumen harus lebih sejahtera, ditunjukkan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dan meninggalkan kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah; penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang mengedepankan sistem merit; pembangunan daerah yang berkeadilan gender, inklusif dan berwawasan lingkungan berkelanjutan; pemerataan pembangunan infrastruktur pada wilayah pinggiran dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (desa dan kawasan perdesaan); dan memiliki kekuatan nilai-nilai keagamaan dan modal sosial sebagai jatidiri masyarakat Kebumen. Dalam rumusan visi ini terkandung empat rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Kebumen di tahun 2029. Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 tahun ke depan, maka penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Kebumen dijelaskan sebagai berikut:

1. **Beriman:** Kebumen Beriman sejatinya mengembalikan daya ingat dan rasa memiliki yang sepenuh hati, bahwa Kabupaten Kebumen merupakan daerah agamis ditandai dengan banyaknya pesantren dan pendidikan keagamaan yang senantiasa menjadi spirit moral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berbasis pada nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal yang mengarusutamakan sikap moderat, toleran, berkeadilan dan saling tolong-menolong.
2. **Maju:** Terbangunnya sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi dan ngayemi dengan dukungan ASN yang berkualitas menuju reformasi birokrasi yang kuat melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), keterbukaan informasi publik yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui teknokreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi pendapatan asli daerah, mendudukkan desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, serta adanya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar berdasar kondisi geografis wilayah dan terwujudnya daerah yang tangguh terhadap bencana.
3. **Sejahtera:** Masyarakat terlindungi dan terjamin kebutuhan dasarnya baik lahir maupun batin yang meliputi pangan, sandang,

papan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya yang didukung peningkatan daya saing ekonomi sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata dan UMKM sesuai potensi lokal dan berbasis digital guna mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat Kebumen sekaligus keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan.

4. **Berbudaya:** Pembangunan Kebumen Berbudaya dilakukan untuk memperkuat budaya lokal yang dimiliki guna menjaga jatidiri Kebumen Beriman. Masyarakat Kebumen sejatinya memiliki modal sosial yang besar dalam hal keswadayaan, gotong royong, partisipasi serta kekuatan nilai-nilai keagamaan yang ditandai keberadaan pesantren dan pendidikan keagamaan dalam mewujudkan kehidupan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kebumen sebagai bumi tua memiliki banyak peninggalan bersejarah yang harus dilestarikan dan dikembangkan sebagai kekuatan jati diri masyarakat Kebumen.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, didukung dengan 5 Misi yaitu :

1. **MISI 1 : Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif.**

Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Sejahtera, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan tidak tebang pilih (inklusif), melalui kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan, jaminan kemudahan dan kualitas pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan, pengurangan pengangguran, pembangunan berkeadilan gender, disabilitas dan inklusi sosial.

2. **MISI 2: Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM yang Inovatif dan Berkelanjutan.**

Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Sejahtera, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah meningkatkan produktivitas sektor sektor pertanian dalam arti luas, pengembangan pariwisata, UMKM serta optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan yang berwawasan lingkungan dengan didukung penuh pengembangan sistem digitalisasi.

3. **MISI 3: Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.**

Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Maju, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah percepatan pembangunan infrastruktur dasar, di antaranya membangun infrastruktur untuk akses sanitasi aman, akses air minum aman, akses hunian layak, akses menuju pusat layanan dasar terutama pada wilayah kantong-kantong kemiskinan dan pusat pengembangan ekonomi sesuai kondisi geografis, percepatan pembangunan infrastruktur desa dan kawasan perdesaan, serta pembangunan daerah tangguh bencana melalui pelestarian lingkungan.

4. **MISI 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi dan ngayemi.**

Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Maju, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah mewujudkan reformasi birokrasi yang salah satunya dengan menerapkan sistem merit, memperkuat partisipasi dan keterbukaan informasi public berbasis digital/SPBE yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui tekno-kreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi PAD dan mendudukkan desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

5. **MISI 5: Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal.**

Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Berbudaya. Seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kebumen harus mencerminkan jati diri Kebumen Beriman, dimana nilai-nilai agama dan budaya lokal sebagai kunci utama mewujudkan Kebumen yang guyub, rukun, damai, tertib dan aman. Agenda kerja yang dilakukan adalah memperkuat dan mengembangkan adat-istiadat, tradisi budaya local Kebumen, mengembangkan karya dan kesenian tradisional khas Kebumen, pelestarian cagar budaya dan optimalisasi fasilitasi pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendukung Bupati dan Wakil Bupati kebumen dalam mencapai Misi ke-5 yaitu ***“Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal”***, melalui : pembinaan kerukunan umat beragama, penguatan wawasan

kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila, pemberdayaan dan pembinaan ormas, pendidikan politik kepada masyarakat, deteksi dini dan kewaspadaan terhadap potensi konflik, serta pelestarian nilai-nilai budaya dalam kehidupan sosial.

Berikut adalah peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mendukung Program Unggulan Kabupaten Kebumen:

1. Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal, keswadaya, gotong royong dan guyub rukun masyarakat diantara menggerakkan kembali siskamling berbasis RT/Dusun, fasilitasi pengembangan seni, dan budaya, dan mendorong kegiatan budaya Desa, seperti: merdi desa, selamatan desa, sedekah laut, serta memfasilitasi pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya.

2.2.2 Isu Strategis Daerah

Isu strategis perangkat daerah adalah permasalahan, tantangan, atau peluang yang bersifat mendasar dan berdampak luas terhadap kinerja, peran, dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, yang memerlukan penanganan prioritas, kebijakan yang tepat, serta langkah-langkah terencana dan terintegrasi karena berpotensi memengaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas, penyelenggaraan pelayanan publik, dan pencapaian sasaran strategis daerah dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

Tabel 2.10

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD (Perangkat Daerah)

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
- Keberagaman sosial, budaya, dan agama sebagai modal persatuan masyarakat - Tingginya jumlah penduduk usia produktif dan partisipasi politik masyarakat - Keberadaan dan aktivitas organisasi kemasyarakatan (Ormas/LSM) - Forum kerukunan (FKUB, FPK) dan kearifan lokal dalam menjaga toleransi	- Masih terdapat potensi konflik sosial berlatar SARA dan kepentingan kelompok - Literasi politik dan kesadaran demokrasi masyarakat masih rendah - Pendataan dan pembinaan Ormas belum optimal - Intensitas dialog lintas agama dan kelompok sosial masih terbatas - Keterbatasan kapasitas SDM	- Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial - Tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan dan partisipatif - Penguatan peran masyarakat sipil dalam pembangunan berkelanjutan - Penguatan harmoni sosial dalam pembangunan berkelanjutan - Penguatan ketahanan sosial dalam	- Meningkatnya konflik identitas dan intoleransi di berbagai Negara - Menurunnya kepercayaan publik terhadap demokrasi global - Meningkatnya peran <i>NGO</i> dan <i>civil society global</i> - Gelombang ekstremisme dan adikalisme global - Ancaman keamanan non-militer	- Penguatan persatuan dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika - Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu - Penataan dan pengawasan Ormas secara nasional - Program penguatan moderasi beragama - Penguatan stabilitas keamanan nasional - Kebijakan nasional	- Dinamika hubungan sosial antarwilayah yang berpotensi memicu gesekan - Dinamika politik lokal menjelang dan pasca pemilu - Aktivitas Ormas lintas wilayah - Kerawanan hubungan sosial antar komunitas lokal - Potensi kerawanan	- Penguatan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial berbasis masyarakat - Peningkatan pendidikan politik dan penguatan budaya demokrasi - Pembinaan, dan pengawasan Ormas secara terpadu - Penguatan peran FKUB dan program moderasi beragama - Penguatan sistem

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
- Jejaring kewaspadaan dini daerah dan koordinasi dengan instansi vertikal - Mobilitas orang asing dan potensi investasi asing - Bonus demografi dan potensi generasi muda	- dan sarana pendukung deteksi dini - Pengawasan terhadap orang asing dan lembaga asing belum maksimal - Menurunnya ketertarikan generasi muda terhadap nilai-nilai kebangsaan	- pembangunan berkelanjutan - Pengelolaan dampak sosial mobilitas penduduk dalam pembangunan berkelanjutan - Pelestarian nilai sosial dan budaya dalam pembangunan berkelanjutan	- global (radikalisme, terorisme) - Arus migrasi dan mobilitas penduduk global - Globalisasi budaya dan gaya hidup	- pengawasan orang asing - Penguatan pendidikan karakter kebangsaan	- konflik sosial antarwilayah - Pergerakan orang asing antarwilayah - Perubahan gaya hidup masyarakat	- kewaspadaan dini daerah - Penguatan koordinasi pengawasan orang asing dan lembaga asing - Revitalisasi wawasan kebangsaan, ideologi Pancasila dan Penguatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra), tujuan dan sasaran merupakan bagian penting dari perumusan perencanaan yang sistematis, terarah, dan terukur dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Tujuan dan sasaran berorientasi pada tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta memperkuat peran strategis OPD dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang efektif, responsif, dan akuntabel.

Tujuan adalah rumusan umum mengenai hasil yang hendak dicapai dalam jangka menengah, yang mencerminkan arah kebijakan dan prioritas strategis organisasi perangkat daerah. Tujuan juga merupakan bentuk operasionalisasi dari misi Kepala Daerah, yang dijabarkan dalam pernyataan yang lebih konkret, dapat diukur, dan realistis. Melalui tujuan yang jelas, perangkat daerah memiliki arah pembangunan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan sasaran, program, dan kegiatan selama periode perencanaan lima tahunan.

Sementara itu, sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, berupa hasil yang lebih terukur dan terperinci yang hendak dicapai dalam kurun waktu perencanaan Renstra. Sasaran berfungsi sebagai landasan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), penentuan program dan kegiatan, serta perumusan target kinerja tahunan dan lima tahunan. Sasaran juga menjadi instrumen pengendalian pelaksanaan kegiatan perangkat daerah serta alat untuk mengukur pencapaian pembangunan daerah secara lebih objektif.

Dengan merumuskan tujuan dan sasaran secara terukur dan terarah, Bakesbangpol Kabupaten Kebumen diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menjaga keutuhan wilayah, meningkatkan toleransi sosial, serta mewujudkan kondisi daerah yang aman dan kondusif guna mendukung keberhasilan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Kebumen disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Sasaran dan Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen

No.	NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatnya kondusivitas wilayah berbasis nilai-nilai keagamaan	Meningkatkan stabilitas keamanan daerah		Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikalisme dan Sumber Daya Ekonomi	100	100	100	100	100	100
2.			Meningkatnya kapasitas daerah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini	Jumlah Kejadian Konflik SARA	5	5	4	4	3	3

Tujuan yang ditetapkan Bakesbangpol dalam periode perencanaan pembangunan tahun 2025–2029 adalah "*Meningkatkan stabilitas keamanan daerah.*" Tujuan ini mencerminkan arah kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga kondusivitas wilayah, mencegah dan menanggulangi potensi konflik sosial yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Stabilitas keamanan daerah menjadi prasyarat utama dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peran Bakesbangpol sangat penting dalam melakukan pemetaan potensi kerawanan sosial politik dan ekonomi, membangun jejaring komunikasi yang efektif dengan unsur masyarakat, serta mendorong penyelesaian konflik secara damai dan berkeadilan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan ini adalah "*Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, ideologi, politik, radikalisme, dan sumber daya ekonomi.*" Indikator ini mencerminkan sejauh mana upaya yang dilakukan pemerintah daerah, khususnya melalui Bakesbangpol, dalam menangani dan menyelesaikan berbagai bentuk konflik yang berpotensi menimbulkan instabilitas.

Dengan indikator ini, pemerintah daerah dapat memantau dan mengevaluasi efektivitas intervensi yang dilakukan, seperti fasilitasi mediasi konflik, peningkatan peran forum-forum kewaspadaan dini, pembinaan terhadap organisasi masyarakat, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan dan toleransi di tengah masyarakat. Semakin tinggi persentase penanganan konflik yang berhasil diselesaikan, maka semakin baik pula pencapaian tujuan peningkatan stabilitas keamanan daerah.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, salah satu sasaran yang ditetapkan oleh Bakesbangpol adalah "*Meningkatnya kapasitas daerah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini.*" Sasaran ini menitikberatkan pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons secara cepat terhadap berbagai potensi gangguan keamanan yang dapat berkembang menjadi konflik terbuka.

Kewaspadaan dini menjadi komponen penting dalam sistem keamanan daerah, karena melalui fungsi deteksi dan pencegahan dini, pemerintah daerah dapat meminimalisir dampak konflik, bahkan mencegah terjadinya konflik sejak dari akar penyebabnya. Kegiatan-kegiatan seperti penguatan

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), pelatihan deteksi dini bagi aparaturnya dan masyarakat, serta peningkatan koordinasi lintas sektor, menjadi bentuk konkret implementasi sasaran ini.

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut adalah *“Jumlah kejadian konflik SARA.”* Indikator ini bersifat kuantitatif dan mencerminkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola dinamika sosial masyarakat yang bersifat sensitif dan berpotensi menimbulkan perpecahan. Semakin sedikit jumlah kejadian konflik SARA yang terjadi, maka semakin efektif pula peran kewaspadaan dini yang dijalankan oleh daerah.

Melalui indikator ini, Bakesbangpol dapat secara berkala mengidentifikasi tren peningkatan atau penurunan konflik SARA, menganalisis penyebab dan wilayah rawan, serta melakukan intervensi kebijakan yang tepat sasaran. Penurunan jumlah konflik juga menjadi cerminan meningkatnya kesadaran dan toleransi masyarakat, serta membaiknya hubungan antar kelompok sosial, budaya, agama, dan politik di daerah.

3.2. Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Strategi Perangkat Daerah merupakan cara dan pendekatan yang ditetapkan oleh perangkat daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat dicapai secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Tahapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030 sebagaimana Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
- Penyusunan peta rawan konflik dan pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat - Penyusunan modul pendidikan politik	- Peningkatan kapasitas kader deteksi dini tingkat kecamatan - Sosialisasi pendidikan politik ke sekolah dan masyarakat - Pembinaan kapasitas	- Implementasi sistem peringatan dini berbasis komunitas - Pengembangan media edukasi demokrasi - Monitoring dan evaluasi terpadu	- Integrasi data potensi konflik dengan sistem kewaspadaan daerah - Penguatan forum-forum	- Pemantapan model pencegahan konflik berbasis masyarakat - Internalisasi budaya demokrasi secara berkelanjutan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
- Pendataan dan validasi database Ormas - Penguatan kelembagaan FKUB - Penyusunan basis data orang/lembaga asing - Penyusunan materi wawasan kebangsaan	- pengurus Ormas - Dialog lintas umat beragama secara rutin - Penguatan koordinasi dengan instansi vertikal terkait - Sosialisasi nilai-nilai Pancasila	- kegiatan Ormas - Pengembangan program moderasi beragama di masyarakat - Pelaksanaan pengawasan terpadu - Pengembangan kader bela negara	- partisipasi publik - Penguatan sistem pelaporan dan pengawasan - Penguatan peran FKUB dalam resolusi konflik sosial - Pengembangan sistem pelaporan terpadu - Sosialisasi program ke sekolah dan masyarakat	- Pemantapan tata kelola Ormas yang tertib dan transparan - Pemantapan FKUB sebagai pusat harmoni sosial - Pemantapan mekanisme pengawasan berkelanjutan - Pemantapan budaya berbangsa dan bernegara

3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah kebijakan merupakan pedoman strategis yang berisi garis besar langkah-langkah yang akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah.

Tabel 3.3

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	- Peningkatan koordinasi antarinstansi keamanan, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah	- Penguatan koordinasi antar instansi pemerintah daerah, TNI/Polri, dan instansi vertikal lainnya	
		- Pengembangan sistem deteksi dini dan penanganan cepat terhadap potensi konflik sosial, kriminalitas, dan gangguan ketertiban umum	- Penguatan peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam pemantauan isu strategis di masyarakat.	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
		- Peningkatan manajemen konflik berbasis kearifan lokal bagi tokoh masyarakat, pemuda, dan perangkat desa	- Pelibatan tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan pencegahan konflik - Menyelenggarakan pendidikan politik bagi pemilih pemula, perempuan, dan kelompok rentan. - Membangun kemitraan dengan parpol dan ormas untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan politik yang berkelanjutan.	
		- Perwujudan forum dialog lintas agama, etnis, dan budaya secara rutin untuk memelihara harmoni sosial dan mencegah konflik horizontal.	- Penguatan kelembagaan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dalam mencegah terjadinya konflik SARA.	
		- Fasilitasi kegiatan sosialisasi hukum, peraturan daerah, dan nilai-nilai toleransi untuk memperkuat kesadaran hukum dan kerukunan antarwarga	- Menyelenggarakan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan secara berkelanjutan di sekolah dan masyarakat. - Menyelenggarakan sosialisasi bahaya narkoba di kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum - Pembentukan dan penguatan kader/ relawan anti-narkoba di lingkungan pendidikan dan masyarakat melalui DUPAN (Duta Pelajar Anti Narkoba).	

BAB IV

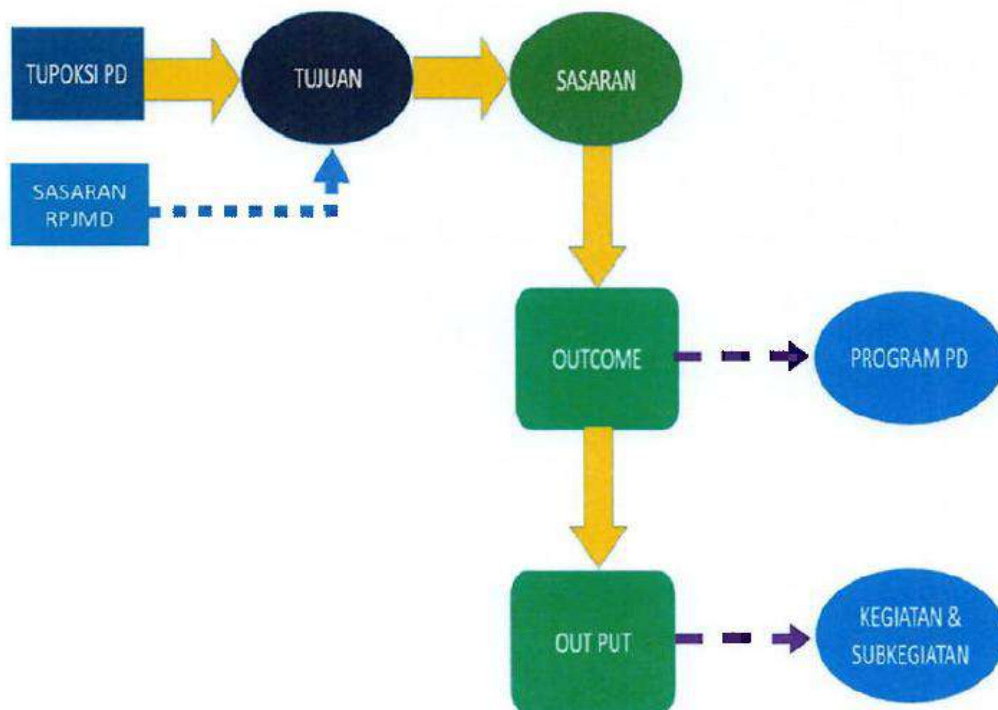
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program dan Kegiatan

A. Rencana Program

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarnya dalam Rencana Strategis (Renstra) telah menetapkan beberapa kegiatan dan subkegiatan yang terhimpun dalam 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) subkegiatan. Program, kegiatan dan subkegiatan ini diharapkan dapat menuntun kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana gambar 4.1

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Perangkat Daerah



Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dalam menjalankan tugas pokok fungsi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
 Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	
1.	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5. Penyediaan Bahan/Material 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	1. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah.	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Mebel 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
B	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
C	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.	1. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
D	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
E	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
F	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik.	

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 6. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Secara lengkap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030 tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2
Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														
8.01.01- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA					4.342.997.209		4.475.004.000		4.609.526.289		4.757.117.945		4.860.017.492	Kesatuan Bangsa dan Politik
Meningkatnya kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Dengan Satuan Indeks)	89,51	90,30	90,40		90,45		90,50		90,55		90,60		Kesatuan Bangsa dan Politik
Meningkatnya kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan Nilai)	71,40	72,75	72,90		73,00		73,20		73,76		75,00		Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02- PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					504.000.000		515.000.000		516.000.000		521.000.000		541.000.000	Kesatuan Bangsa dan Politik
Meningkatnya pemahaman terhadap ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase pemahaman terhadap ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (Dengan Satuan Persen)	73	75	77		79		81		83		85		Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03- PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN					3.780.480.000		3.786.480.000		27.790.480.000		49.835.480.000		3.800.480.000	Kesatuan Bangsa dan Politik

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK														
Meningkatnya Pemahamanan terhadap Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Pemahamanan terhadap Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Dengan Satuan Persen)	73	75	77		79		81		83		85		Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					67.000.000		72.000.000		73.000.000		75.000.000		85.000.000	Kesatuan Bangsa dan Politik
Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan dan pengawasan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan (Dengan Satuan Persen)	72	72	74		78		82		86		90		Kesatuan Bangsa dan Politik

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
8.01.05- PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					207.047.000		171.047.000		172.547.000		178.547.000		193.547.000	Kesatuan Bangsa dan Politik	
Meningkatnya pemahaman terhadap pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase pemahaman terhadap pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya (Dengan Satuan Persen)	73	75	77			79		81		83		85		Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06- PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					415.000.000		504.000.000		509.000.000		561.600.000		597.800.000	Kesatuan Bangsa dan Politik	
Meningkatnya kewaspadaan nasional di daerah dan penanganan konflik sosial dan kerjasama intelijen	Persentase kewaspadaan nasional di daerah dan penanganan konflik sosial dan kerjasama intelijen (Dengan Satuan Persen)	100	100	100			100		100		100		100		Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 4.3
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
Meningkatnya kondusivitas wilayah berbasis nilai-nilai keagamaan	Meningkatkan stabilitas keamanan daerah				Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikalisme dan Sumber Daya Ekonomi		
		Meningkatnya kapasitas daerah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini			Jumlah Kejadian Konflik SARA		
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
			Perangkat Daerah				
				Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
					Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
				Urusan Pemerintah Daerah			
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik	Jumlah unit Pemeliharaan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
				Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter		Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Paancasila dan Karakter Kebangsaan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
			Kebangsaan				
				Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara , Karakter Bangsa , Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			Meningkatnya Pemahaman terhadap Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,		Persentase Pemahaman terhadap Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
			Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
				Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
				Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik , Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
					Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
			Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan		Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
				Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
					Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
			Meningkatnya pemahaman terhadap pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya		Persentase Pemahaman terhadap pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
				Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
					Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			Meningkatnya kewaspadaan nasional di		Persentase kewaspadaan nasional di daerah	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
			daerah dan penanganan konflik sosial dan kerjasama intelijen		dan penanganan konflik sosial dan kerjasama intelijen	Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
				Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
					Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang disusun		
					Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing , Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
					pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
					Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
					antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	

4.2 URAIAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET, DAN PAGU INDIKATIF

Tabel 4.4

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN				
				2025	2026		2027		2028		2029		2030						
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)				
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				9.316.524.209		9.523.531.000		33.670.553.289		55.928.744.945		10.077.844.492						
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				9.316.524.209		9.523.531.000		33.670.553.289		55.928.744.945		10.077.844.492						
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.342.997.209			4.475.004.000			4.609.526.289			4.757.117.945			4.860.017.492		
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Indeks)	89,51	90,30	90,40		90,45		90,50		90,55		90,60			- Sekretariat			
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	71,40	72,75	72,90		73,00		73,20		73,76		75,00			- Sekretariat			
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					22.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000					
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	7	7	14		14		14		16		14			Kepala Sub Program Anggaran dan Keuangan			
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					15.000.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000		Kepala Sub Program Anggaran dan Keuangan			
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	6		6		6		8		6			Kepala Sub Program Anggaran dan Keuangan			
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					7.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		Kepala Sub Program Anggaran dan Keuangan			
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	8		8		8		8		8			Kepala Sub Program Anggaran dan Keuangan			
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.918.316.882		4.036.498.328		4.162.479.626		4.294.351.344		4.386.199.455					
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah (Dengan Satuan:bulan)	12	12	12		12		12		12		12			Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					3.905.316.882		4.023.498.328		4.149.479.626		4.281.351.344		4.372.199.455	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	23	23	28		28		28		28		28		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					13.000.000		13.000.000		13.000.000		13.000.000		14.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	8		8		8		8		8		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					25.000.000		27.000.000		28.000.000		28.000.000		29.000.000	
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)	0	0	30		30		30		30		30		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					25.000.000		27.000.000		28.000.000		28.000.000		29.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	0	0	30		30		30		30		30		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					83.536.327		86.661.672		90.002.663		95.452.601		98.574.037	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					3.087.000		3.287.000		3.500.000		3.500.000		4.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	4	1		1		1		1		1		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					10.000.000		10.500.000		11.000.000		11.500.000		12.200.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	3		3		3		3		3		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					6.449.327		7.134.672		8.062.663		8.152.601		8.274.037	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	3		3		3		3		3		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	12		12		12		12		12		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					11.000.000		11.500.000		12.000.000		12.000.000		13.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	1		1		1		1		1		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					48.000.000		48.740.000		49.740.000		54.600.000		55.100.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					2.000.000		2.500.000		2.700.000		2.700.000		3.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					35.000.000		36.000.000		36.500.000		37.500.000		37.500.000	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	3	7	6		3		3		3		3		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					35.000.000		36.000.000		36.500.000		37.500.000		37.500.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	3	7	6		3		3		3		3		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					129.144.000		131.344.000		132.544.000		133.644.000		135.144.000	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2.000.000		2.200.000		2.400.000		2.500.000		2.500.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	1		1		1		1		1		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					55.000.000		56.000.000		56.500.000		57.000.000		58.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					72.144.000		73.144.000		73.644.000		74.144.000		74.644.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					130.000.000		133.500.000		136.000.000		144.170.000		149.600.000	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	35	35	39		39		43		44		45		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					75.000.000		76.000.000		76.700.000		84.370.000		84.600.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	7	7	17		17		17		17		17		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					2.000.000		2.500.000		2.800.000		2.800.000		3.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	12	12	5		5		8		8		8		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					18.000.000		19.000.000		19.500.000		20.000.000		20.500.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	15	15	15		15		16		17		18		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					35.000.000		36.000.000		37.000.000		37.000.000		41.500.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	2		2		2		2		2		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					504.000.000		515.000.000		516.000.000		521.000.000		541.000.000	
	Meningkatnya Pemahaman terhadap Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Dengan Satuan:Persen)	73	75	77		79		81		83		85		- Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					504.000.000		515.000.000		516.000.000		521.000.000		541.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan (Dengan Satuan:Kegiatan)	23	23	2		2		2		2		2		Ketua Tim Kerja Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					504.000.000		515.000.000		516.000.000		521.000.000		541.000.000	Ketua Tim Kerja Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Ketua Tim Kerja Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					3.780.480.000		3.786.480.000		27.790.480.000		49.835.480.000		3.800.480.000	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya Pemahaman terhadap Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Pemahaman terhadap Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Dengan Satuan:Person)	73	75	77		79		81		83		85		- Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					3.780.480.000		3.786.480.000		27.790.480.000		49.835.480.000		3.800.480.000	
	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik (Dengan Satuan:Kegiatan)	4	4	2		2		2		2		2		Ketua Tim Kerja Politik Dalam Negeri
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					3.780.480.000		3.786.480.000		27.790.480.000		49.835.480.000		3.800.480.000	Ketua Tim Kerja Politik Dalam Negeri
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	100	100	100		1600		110		120		130		Ketua Tim Kerja Politik Dalam Negeri
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					67.000.000		72.000.000		73.000.000		75.000.000		85.000.000	
	Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan dan pengawasan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan (Dengan Satuan:Person)	72	72	74		78		82		86		90		- Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					67.000.000		72.000.000		73.000.000		75.000.000		85.000.000	
	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Dengan Satuan:Kegiatan)	2	2	2		2		2		2		2		Ketua Tim Kerja Organisasi Kemasyarakatan
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					67.000.000		72.000.000		73.000.000		75.000.000		85.000.000	Ketua Tim Kerja Organisasi Kemasyarakatan
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	150	100	100		100		100		110		120		Ketua Tim Kerja Organisasi Kemasyarakatan
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					207.047.000		171.047.000		172.547.000		178.547.000		193.547.000	
	Meningkatnya pemahaman terhadap pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase pemahaman terhadap pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya (Dengan Satuan:Persen)	73	75	77		79		81		83		85		- Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					207.047.000		171.047.000		172.547.000		178.547.000		193.547.000	
	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya (Dengan Satuan:Kegiatan)	5	3	3		3		3		3		3		Ketua Tim Kerja Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					80.000.000		85.000.000		86.000.000		90.000.000		100.000.000	Ketua Tim Kerja Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	200	100	100		2100		100		110		120		Ketua Tim Kerja Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					127.047.000		86.047.000		86.547.000		88.547.000		93.547.000	Ketua Tim Kerja Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	175	175	100		100		100		110		120		Ketua Tim Kerja Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					415.000.000		504.000.000		509.000.000		561.600.000		597.800.000	
	Meningkatnya kewaspadaan nasional di daerah dan penanganan konflik sosial dan kerjasama Intelijen	Persentase kewaspadaan nasional di daerah dan penanganan konflik sosial dan kerjasama Intelijen (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		- Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					415.000.000		504.000.000		509.000.000		561.600.000		597.800.000	
	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial (Dengan Satuan:Dokumen)	5	12	12		13		13		13		13		Ketua Tim Kerja Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					73.000.000		78.000.000		79.000.000		85.000.000		95.000.000	Ketua Tim Kerja Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		Ketua Tim Kerja Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					51.000.000		56.000.000		57.000.000		63.000.000		68.000.000	Ketua Tim Kerja Penanganan Konflik
	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	5	4	4		4		4		4		4		Ketua Tim Kerja Penanganan Konflik
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					75.000.000		80.000.000		81.000.000		86.000.000		91.000.000	Ketua Tim Kerja Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	540	100	100		100		100		110		120		Ketua Tim Kerja Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					80.000.000		85.000.000		86.000.000		91.000.000		96.000.000	Ketua Tim Kerja Penanganan Konflik

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	390	390	100		1600		100		110		120		Ketua Tim Kerja Penaganan Konflik
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					6.000.000		8.000.000		8.000.000		8.800.000		10.000.000	Ketua Tim Kerja Penaganan Konflik
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		Ketua Tim Kerja Penaganan Konflik
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota					130.000.000		197.000.000		198.000.000		227.800.000		237.800.000	Ketua Tim Kerja Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		Ketua Tim Kerja Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
			TOTAL:		9.316.524.209		9.523.531.000		33.670.553.289		55.928.744.945		10.077.844.492		

4.3 URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Tabel 4.4
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mendukung Program Unggulan Bupati Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun
		Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Penyediaan Bahan/Material	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan JasaPemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Mebel	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2	Program Penguatan Ideologi Paancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya Pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
3	Program Peningkatan Peran PartailPolitik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya Pemahaman terhadap Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
4	Pogram Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Meningkatnya pemahaman terhadap pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya kewaspadaan nasional di daerah dan penanganan konflik sosial dan kerjasama intelijen	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	

4.4 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Tujuan :								
	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikalisme dan Sumber Daya Ekonomi	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Sasaran :								
	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	5	5	4	4	3	3	

4.5 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NOMOR	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Nihil	-	-	-	-	-	-	-	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 ini disusun sebagai pedoman arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Dokumen ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen terpilih Tahun 2024, khususnya dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang rukun, demokratis, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan semangat kebangsaan.

Melalui pelaksanaan Renstra ini, diharapkan tercipta sinergi antar perangkat daerah dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, dan integrasi nasional. Komitmen untuk menguatkan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, deteksi dan cegah dini terhadap potensi konflik, serta penguatan kelembagaan politik menjadi bagian integral dalam membangun Kabupaten Kebumen yang aman, tertib, dan berdaya saing.

Akhir kata, semoga Renstra ini dapat menjadi acuan yang efektif dan responsif dalam menghadapi dinamika sosial politik ke depan. Pelaksanaan dan pencapaiannya tentu memerlukan kerja sama lintas sektor serta pengawasan yang berkelanjutan, guna memastikan setiap target dan indikator yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal demi terwujudnya Kebumen *"Berdaya : Kebumen Beriman Maju Sejahtera Berbudaya."*

Kebumen, 19 September 2025



Bupati Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen

WIBISONO, S.H., M.H.

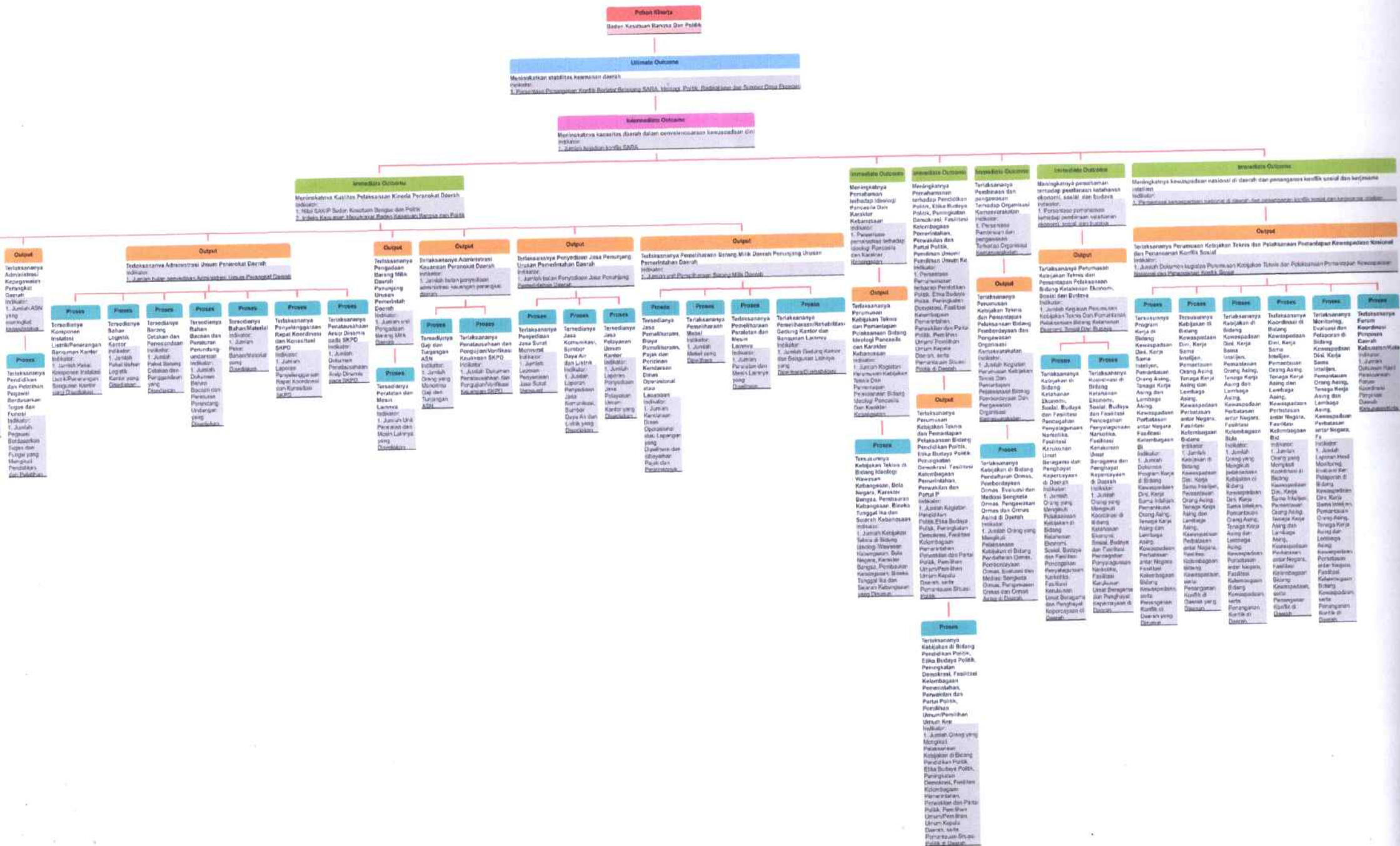
Asisten Utama Muda

NIP. 196811281996031006

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Agus Setyaningrum	
Cahyo Riyadi	

LAMPIRAN

POHON KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



CASCADING BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK





Kebumen, 18 Maret 2025

Nomor : 000.7.2 / 98 / 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kebumen
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
3. Terlampir
di
Tempat

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada:

hari/tanggal : Rabu, 19 Maret 2025
waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai
tempat : Gedung Sekretariat Bersama (Sekber) Jalan Rumah Sakit Lama Kebumen
acara : Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra 2025-2029 dan Renja 2026
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen
keterangan : Ketua FKUB untuk mengirimkan perwakilan dari unsur keagamaan (6 orang)

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Widiatmoko, S.H, MH.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196811281996031006

TUJUAN SURAT

No.	Tujuan
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kebumen
2.	Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
3.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
5.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
7.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kebumen
8.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kebumen
9.	Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen
10.	Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kebumen
11.	Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kebumen
12.	Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kebumen
13.	Ketua Partai Demokrat Kebumen
14.	Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Kebumen
15.	Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kebumen
16.	Ketua Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kebumen
17.	Ketua Partai GERINDRA Kebumen
18.	Ketua Partai NASDEM Kebumen
19.	Kepala Polres Kebumen
20.	Dandim 0709 Kebumen
21.	Ketua KPU Kebumen
22.	Ketua Bawaslu Kebumen
23.	Ketua FKDM Kabupaten Kebumen
24.	Ketua FKUB Kabupaten Kebumen
25.	Ketua PCNU Kabupaten Kebumen
26.	Ketua GOW Kabupaten Kebumen
27.	Ketua Forum Anak Kabupaten Kebumen
28.	Ketua Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kebumen
29.	Tim Penyelenggara Forum PD Bakesbangpol Kab. Kebumen (Kabid menyertakan subkoordinator/JFT masing-masing)

DOKUMENTASI

FORUM PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN HARI/TANGGAL : KAMIS, 12 FEBRUARI 2026









**HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029**

Pada hari Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029 yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan materi Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kebumen, Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen, Bappeda Kabupaten Kebumen, dan BPKPD Kabupaten Kebumen.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan forum Perangkat Daerah, maka pada:

Hari dan Tanggal : Rabu, 19 Maret 2025
Jam : Pukul 12.00 WIB
Tempat : Aula Sekretariat Bersama Jl. Rumah Sakit Lama Kebumen

Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029:

MENYEPAKATI

- KESATU** : Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA** : Rencana program, kegiatan dan sub-kegiatan prioritas Perangkat Daerah Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini..
- KETIGA** : Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.
- KEEMPAT** : Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KELIMA** : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Rencana Strategis Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

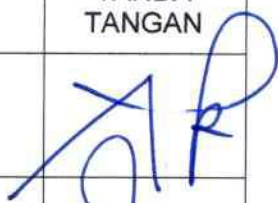
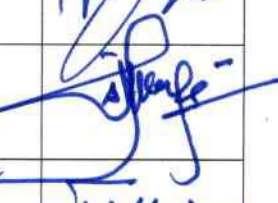
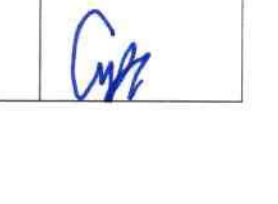
Kebumen, 19 Maret 2025

Pimpinan Sidang
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Kebumen



Widiatmoko, S.H.,M.H.

Mewakili Peserta Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

No.	Nama	Lembaga/ Instansi	Jabatan/ Alamat	TANDA TANGAN
1.	Agung Pambudi, S.IP., M.Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Kebumen	Kebumen	
2.	M Madkhan Anis	Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen	Kebumen	
3.	Dzakiatul Banat	KPU Kabupaten Kebumen	Kebumen	
4.	Kompol Joko Maryono	Polres Kebumen	Kebumen	
5.	Cahyo Ngadmanto, S.H.	BAPPEDA Kabupaten Kebumen	Kebumen	
6.	Heri Setyanto	FKDM Kabupaten Kebumen	Kebumen	
7.	Cut Mutia H	Forum Anak Kabupaten Kebumen	Kebumen	

DELEGASI PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN PADA MUSRENBANG RPJMD KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029

No	Nama	Instansi	Alamat	Tanda Tangan
1.	KH. Drs. Azhar Muhammadi, M.Ag	FKUB Kabupaten Kebumen	Kebumen	



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Arungbinang No: 15 Kabupaten Kebumen, Kode Pos 54311
Telepon (0287) 384088, Faksimile (0287) 384088,
Laman www.kesbangpol.kebumenkab.go.id,
Pos-el kesbangpolkebumen@gmail.com

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR :000.7.2.2/ 26 /KEP/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen, sesuai arah kebijakan dan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen, maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6298);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, dengan susunan tim sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sebagaimana diktum KESATU sebagai berikut :
1. Mereview hasil pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.
 2. Melakukan telaah terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.
 3. Merumuskan tujuan, sasaran dan program/kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

4. Merumuskan kegiatan prioritas Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.
5. Menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Renstra sesuai bidangnya masing-masing pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.
6. Melaksanakan penyempurnaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atas hasil telaahan, koreksi dan masukan sesuai bidangnya masing-masing.
7. Bertanggung jawab sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Kebumen.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 2 Desember 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN



LAMPIRAN. : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 000.7.2.2/ 26 /KEP/
2024
TANGGAL : 2 Desember 2024

DAFTAR TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	WIDIATMOKO, S.H.,M.H. 196811281996031006	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
2	TRI TUNGGAH EKO SAPTO, S.KM.,MPH. 197201051994031006	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
3	PRATIKNO, S.Sos. 196911021995101001	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Anggota
4	RISSEON P. SIHOTANG, S.Sos.,M.Si. 196707221987031003	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
5	DEVI ARIFFIN SETYO PURWOKO, S.SIT. 198202012003121005	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Anggota
6	SUMARWOTO, S.ST. 197601291996031001	Kepala Subbagian Program Anggaran dan Keuangan	Anggota
7	NITA YUNIATI, S.H. 198306182011012010	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
8	HERU WIBOWO, S.Sos. 197502071996031001	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
9	SRI KANTHI ARY PUSPTANINGRUM, S.Psi. 198808292011012006	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
10	PRIMAT KARUNianto, S.Tr.Sos, M.M 198604032006041002	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
11	DANNY HERAWAN, S.STP. 198604032006041002	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota

12	SUMYONO, A.Md.Akun. 196804032007011044	Bendahara Pengeluaran	Anggota
12	NUR AZMIYATI, A.Md. 198701162010012017	Pranata Komputer	Anggota
13	UKKY TRY LESTARI, A.Md. 199308082022032006	Verifikator Keuangan	Anggota
14	WIWIT ANJAR LESTARI, A.Md. 199405202024212015	Arsiparis Terampil	Anggota



KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN

WIDIATMOKO